



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

Tahun 2025

**KECAMATAN
BARANTI**

SIDENRENG

RAPPANG

Alamat :

Jl. Veteran No. 68 Kel. Duampanua

Kecamatan Baranti

Kabupaten Sidenreng Rappang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Baranti Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan dedikasi seluruh jajaran staf dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, sekaligus menjadi refleksi atas upaya perbaikan berkelanjutan di wilayah kami.

Penyusunan LKjIP tahun 2025 memiliki makna strategis yang penting, karena tahun ini merupakan tahun pertama dari masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja tahunan, tetapi juga menjadi fondasi awal dalam menyelaraskan program kerja kecamatan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pimpinan daerah yang baru demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Baranti sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat desa, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui transparansi informasi dalam laporan ini, kami mengundang kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga langkah kolaboratif kita senantiasa membawa kemajuan bagi Kecamatan Baranti dan Kabupaten Sidenreng Rappang..

Baranti, 09 Januari 2026

CAMAT BARANTI,



Hj. MASTURA, S.Pt

Pangkat : Penata Tk.I / III.d

NIP : 197805232003122009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II RENCANA KERJA DAN PENETAPAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	9
C. PENETAPAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA.....	15
B. REALISASI ANGGARAN.....	26
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Di era yang semakin kompleks ini, masyarakat menuntut pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, Kantor Camat Baranti berkomitmen untuk menyusun laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

Kecamatan Baranti, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki tantangan dan potensi yang unik. Dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, masyarakat Baranti memiliki harapan yang tinggi terhadap pemerintah dalam hal pelayanan publik. Dalam konteks ini, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan formal, tetapi juga sebagai alat untuk mendengarkan suara masyarakat dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.

Selama tahun 2025, Kantor Camat Baranti telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam penyusunan laporan ini, kami berusaha untuk menggambarkan secara komprehensif capaian-capaian yang telah diraih serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Kami mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk hasil evaluasi internal dan masukan dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan ini

mencerminkan realitas di lapangan dan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan ke depan.

Selain itu, kami juga ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, LKjIP ini juga menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kami berharap bahwa laporan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja Kantor Camat Baranti selama tahun 2025, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi semua pihak untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, kami yakin Kecamatan Baranti dapat mencapai kemajuan yang signifikan di masa mendatang.

Melalui LKjIP ini, kami mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama mengevaluasi kinerja kami dan memberikan masukan konstruktif demi perbaikan di masa depan. Semoga laporan ini dapat menjadi langkah awal menuju peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat Kecamatan Baranti.

b. Kondisi Umum Kecamatan Baranti

Kecamatan Baranti, yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik unik dan beragam. Dengan luas wilayah sekitar 5.389 km², Kecamatan Baranti terdiri dari lima kelurahan dan empat desa, yaitu Kelurahan Baranti, Dumapanua, Benteng, Manisa, serta Desa Passeno, Sipodeceng, TonrongE, dan Tonrong Rijang.

Kecamatan Baranti memiliki populasi yang beragam dengan latar belakang sosial ekonomi yang bervariasi. Masyarakat di kecamatan ini sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah setempat telah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan

infrastruktur. Namun, tantangan seperti pengangguran serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih menjadi isu yang perlu ditangani.

Dari segi infrastruktur, Kecamatan Baranti telah mengalami perkembangan yang signifikan. Terdapat berbagai fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, rumah ibadah, sekolah, puskesmas, dan pasar. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas jalan dan fasilitas publik lainnya agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.

c. Gambaran Umum Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan tertuang secara lengkap mengenai Organisasi Kantor Camat Baranti dengan gambaran sebagai berikut :

i. Kedudukan

Camat berkedudukan sebagai kepala dan pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

ii. Tugas Pokok

Tugas pokok camat membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan Masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

iii. Fungsi

Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;

- Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- Penyelenggaraan pelayanan umum;
- Pengoordinasian Lembaga social dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberika oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

iv. Kewenangan

Selain tugas pokok dan fungsi Camat juga mendapat pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, antara lain:

- a. Aspek perizinan dan non perizinan
- b. Urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, dana penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, sosial, administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.

v. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Baranti terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
 - ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Sumber Daya Kantor Kecamatan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibutuhkan sumber daya yang memadai sebagai pendukung, sumber daya tersebut terdiri atas :

i. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Camat Baranti beserta Empat Kelurahan terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Dimana ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 (Satu) orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 20 (Dua Puluh Orang), sedangkan Non ASN 0 (Nihil) Orang.

Sebagai penggambaran lebih lanjut dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Gambaran Sumber Daya Manusia Kantor Camat Baranti

Status	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
	Laki - Laki	Perempuan		
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12	16	28	
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	6	15	21	Termasuk PPPK Paruh Waktu
Non ASN				
Jumlah	18	31	49	

Sumber Data : Kantor Camat Baranti

ii. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana utama pada Kantor Camat Baranti diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasaran Utama Kantor Camat Baranti

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Kantor Camat Baranti	1 Unit	RR
2	Kantor Lurah	5 Unit	
3	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	RB
4	Aula Kantor Camat	1 Unit	
5	Mobil Dinas	1 Unit	B
6	Sepeda Motor	38 Unit	
7	Meja Rapat	7 Unit	
8	Meja Kerja	37 Unit	
9	Kursi Kerja	11 Unit	
10	Kursi Rapat	13 Unit	
11	Kursi Tamu	7 Set	
12	Lemari	12 Unit	
13	Komputer	10 Unit	
14	Laptop	8 Unit	
15	Air Conditioner	9 Unit	
16	Printer	7 Unit	

Sumber Data : Kantor Camat Baranti

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Baranti adalah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara spesifik, maksud dari penyusunan LKjIP adalah untuk:

1. **Menilai Kinerja** : Mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Baranti, serta dampaknya terhadap masyarakat.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta akuntabilitas kepada masyarakat mengenai hasil-hasil yang dicapai.
3. **Dasar Perencanaan** : Menjadi acuan dalam perencanaan program kerja di tahun-tahun mendatang, serta identifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut
4. **Mendorong Partisipasi Masyarakat** : Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dengan memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintah.
5. **Peningkatan Kualitas Pelayanan** : Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan riil di lapangan.

Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan formal, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan akuntabel.

C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja;
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

BAB II

RENCANA KERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RenStra) tahun 2025-2029 merupakan Rencana Strategis yang memuat dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Renstra yang disusun memiliki peran penting untuk pencapaian pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan, sehubungan dengan hal tersebut maka pada rencana strategis tidak terdapat visi dan misi yang berkaitan dengan kepala daerah.

Namun demikian Kantor Camat Baranti memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu :

a. Tujuan

Tujuan rencana strategis Kantor Camat Baranti adalah :

- ✓ Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

b. Sasaran

Dari tujuan di atas dirumuskan sasaran sebagai berikut :

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum;
- ✓ Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
- ✓ Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan;
- ✓ Meningkatnya kualitas tata kelola Kinerja dan Keuangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan pada kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama saat ini memiliki indikator baru karena dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Baranti Tahun 2025 – 2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baranti periode 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Baranti

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	<i>Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Poin	75,80	75,90	76,00	76,100	76,200	76,300
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan / Jumlah target kegiatan pemberdayaan Masyarakat x 100</i>	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	<i>Jumlah Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik / Jumlah Bidang Urusan yang menjadi kewenangan)x 100</i>	%	100	100	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah Desa diawasi}}{\text{Jumlah Desa dalam Wilayah}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	Hasil Evaluasi APiP	Angka	63,2	63,4	64	64,5	65	65,5

C. PENETAPAN KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan dari rencana kerja telah dirumuskan target – target sasaran kinerja yang ingin dicapai dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja untuk periode tahun 2025.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kantor Camat baranti Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	<i>Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Poin	75,80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan / Jumlah target kegiatan pemberdayaan Masyarakat x 100</i>	%	100
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	<i>Jumlah Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik / Jumlah Bidang Urusan yang menjadi kewenangan)x 100</i>	%	100
4	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik	<i>Jumlah Desa diawasi / Jumlah Desa dalam Wilayah x 100</i>	%	100
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	<i>Hasil Evaluasi APIP</i>	Angka	63,2

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja dilakukan dengan 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dengan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025. Program kegiatan dan Sub kegiatan ini juga

dilaksanakan pula oleh 5 (Lima) Kelurahan yang berada pada Wilayah Kecamatan Baranti, kelurahan tersebut adalah Kelurahan Baranti, Kelurahan Panreng, Kelurahan Duampanua, Kelurahan Manisa dan Kelurahan Benteng.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran idealnya dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 ini memiliki indikator baru karena dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Baranti Tahun 2025-2029.

Indikator yang Dalam rangka melihat keberhasilan dari sebuah tujuan dan sasaran perlu diketahui ukuran berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Fungsi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperjelas nilai dari pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Hasil Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baranti Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	<i>Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Poin	75,80	Hasil IKM Belum dirilis	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan / Jumlah target kegiatan pemberdayaan Masyarakat x 100</i>	%	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	<i>Jumlah Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik / Jumlah Bidang Urusan yang menjadi kewenangan)x 100</i>	%	100	100	100

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah Desa diawasi} / \text{Jumlah Desa dalam Wilayah}}{x 100}$	%	100	100	100
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	Hasil Evaluasi APIP	Angka	63,2	Hasil LHE Belum dirilis	

Capaian berdasarkan indikator -indikator dari sasaran yang telah dirumuskan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk menilai tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan publik, dengan membandingkan harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima dari aparat pemerintah. Tujuannya adalah mendapatkan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengukur kinerja unit pelayanan, serta sebagai bahan evaluasi kebijakan untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang. IKM diukur melalui survei menggunakan kuesioner yang menilai berbagai unsur pelayanan, seperti prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, serta kenyamanan dan keamanan.

Namun pada saat penyusunan dokumen ini, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Baranti yang ditargetkan 75,80 Poin belum dirilis secara resmi.

b. Indikator 2 : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik

Kesesuaian Realisasi dan Target indikator “Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik” pada tahun 2025 mencapai 100% atau Mencapai Target sebagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ditargetkan dan dianggarkan

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.

c. Indikator 3 : Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik

Target Indikator “Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik” sebesar 100% yaitu pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat tersebut dibagi dalam urusan-urusan tersebut dilayani dengan baik sehingga menghasilkan dokumen yang sesuai manfaat dan kegunaannya. Urusan tersebut antara lain Administrasi Persuratan Tanah, Administrasi Kependudukan dan Pemberian Rekomendasi serta pelayanan dan koordinasi lainnya.

d. Indikator 4 : Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik

Kinerja pada Indikator “Persentase Jumlah Desa yang dibina dan diawasi” mencapai 100% atau dengan kata lain bahwa 4 (Empat) Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Baranti telah dilakukan Pembinaan dan Pengawasan. Desa – desa tersebut adalah Passeno, Sipodeceng, Tonronge dan Tonrong Rijang.

e. Indikator 5 : Predikat Nilai SAKIP

Evaluasi nilai SAKIP yang dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Daerah dan diterbitkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Dalam evaluasi ini hal – hal yang menjadi objek penilaian adalah (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja (3) Pelaporan Kinerja dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan target pada tahun ini poin sebesar 63,20, namun pada saat penyusunan Laporan ini LHE periode tahun 2025 belum rilis.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Sebagai bahan pertimbangan untuk capaian kinerja dan dalam rangka menentukan kebijakan – kebijakan selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, yaitu :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja		
				2023	2024	2025
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Poin	61,50 (B)		LHE belum Rilis
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	Persen	100	100	100
4	Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	100	100

3. Realisasi Capaian Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Rencana Strategis sehingga untuk perbandingan capaian kinerja dengan Rencana Strategis ditampilkan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						
			2025		2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Realisasi					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	75,80	Belum Rilis	75,90	76,00	76,100	76,200	76,300
2	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Predikat Nilai SAKIP	Angka	63,2	Belum Rilis	63,4	64	64,5	65	65,5

Pada tabel ini belum dapat ditampilkan realisasi hasil pada tahun – tahun yang akan datang.

Realisasi capaian kinerja pada Rencana Strategis Kecamatan Baranti periode Renstra sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Perubahan Rencana Strategis						Target Akhir Renstra
		2024		2025		2026		
		T	R	T	R	T	R	
1	Predikat Nilai SAKIP	63,1 (B)		63,2 (B)	LHE belum rilis -	63,4 (B)	-	63,4 (B)
2	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	100%	100%	100%	-	100%	-	100%
3	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	78%	100%	83%	-	85%	-	85%
4	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina dan Diawasi	100%	100%	100%	-	100%	-	100%

Sumber data : Kantor Camat Baranti

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Baranti yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2025 adalah penetapan target kinerja di Rencana Strategis yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Baranti. Selain itu juga yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaikan Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya adalah faktor yang sangat berperan dalam pencapaian target kinerja organisasi, hasil Analisa atas efisiensi pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sumber Dana

Anggaran yang tercantum dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.511.954.000, (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 4.389.631.699,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 97,29%.

Dana tersebut terbagi pada Kantor Camat beserta 5 (Lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Baranti, Kelurahan Panreng, Kelurahan Duampanua, Kelurahan Manisa dan Kelurahan Benteng.

Dari realisasi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dapat terlaksana dengan pemanfaatan sumber daya yang cukup efisien.

2. Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai salah satu dari sumber daya Kantor Camat Baranti terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 (Dua Puluh Satu) Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk PPPK paruh waktu yang bertugas di Kantor Camat dan Kantor Lurah.

6. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Pada Sasaran ini semua program kegiatan dan sub kegiatan baik yang dilaksanakan di Kantor Camat ataupun yang dilaksanakan di Kelurahan merupakan pendukung sasaran.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum

Sasaran ini didukung dengan 3 (tiga) Program yaitu :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - ii. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - i. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

3) Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat

Sasaran ini di dukung dengan Program Kegiatan serta sub kegiatan berikut :

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - i. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - ii. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - iii. Evaluasi Kelurahan

1) Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Sasaran ini di dukung dengan Program Kegiatan serta sub kegiatan berikut :

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- i. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- ii. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- iii. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas tata kelola Kinerja dan Keuangan

Sasaran ini di dukung dengan Program Kegiatan serta sub kegiatan berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- iv. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- v. Fasilitas Kunjungan Tamu
- vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- i. Pengadaan Mebel

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tercantum dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 4.511.954.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)** dan realisasi sebesar **Rp. 4.389.631.699,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)** atau sebesar **97,29%**.

Dana tersebut terbagi pada Kantor Camat beserta 5 (Lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Baranti, Kelurahan Panreng, Kelurahan Duampanua, Kelurahan Manisa dan Kelurahan Benteng.

BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditentukan namun demikian masih terdapat tantangan – tantangan yang perlu untuk menjadi perhatian pada masa – masa yang akan datang.

Hal – hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan beserta Kelurahan dan Desa.
- b. Memperkuat komitmen dalam rangka pencapaian kinerja
- c. Melakukan perbaikan – perbaikan yang dirasa perlu baik pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Komponen – komponen anggaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Baranti, 09 Januari 2026

CAMAT BARANTI,

Hi. MASTURA, S.Pt

Pangkat : Penata Tk.I / III.d

NIP : 197805232003122009

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KECAMATAN BARANTI**

Periode : Desember 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		ANGGARAN	%	FISIK (%)		
	4.511.954.000	4.389.631.699	97,29		122.322.301	
KECAMATAN BARANTI	3.369.492.300	3.265.597.137	96,92		103.895.163	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.314.472.300	3.213.723.137	96,96	100,00	100.749.163	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400.000	-	-	-	400.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.122.948.000	3.054.518.665	97,81	100,00	68.429.335	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.122.948.000	3.054.518.665	97,81	100,00	68.429.335	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.799.500	50.521.100	85,92	100,00	8.278.400	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	915.000	915.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.749.000	21.354.000	98,18	100,00	395.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.070.000	990.000	47,83	100,00	1.080.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.040.000	4.040.000	100,00	100,00	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.225.000	6.212.500	99,80	100,00	12.500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.800.500	17.009.600	71,47	100,00	6.790.900	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.200.800	69.170.772	79,32	100,00	18.030.028	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.025.000	1.790.000	88,40	100,00	235.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.279.000	6.603.972	34,25	100,00	12.675.028	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.896.800	60.776.800	92,23	100,00	5.120.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.124.000	39.512.600	87,56	100,00	5.611.400	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	9.388.600	62,59	100,00	5.611.400	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.374.000	2.374.000	100,00	100,00	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.750.000	27.750.000	100,00	100,00	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.190.000	1.664.000	52,16	100,00	1.526.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.190.000	1.664.000	52,16	100,00	1.526.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.595.000	315.000	19,75	100,00	1.280.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.595.000	1.349.000	84,58	100,00	246.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	630.000	210.000	33,33	33,33	420.000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		ANGGARAN	%	FISIK (%)		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	210.000	-	-	-	210.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	210.000	-	-	-	210.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	420.000	210.000	50,00	50,00	210.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.000	210.000	100,00	100,00	-	
Evaluasi Kelurahan	210.000	-	-	100,00	210.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	-	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	-	
ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.200.000	-	-	-	1.200.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.200.000	-	-	-	1.200.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	400.000	-	-	-	400.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	400.000	-	-	-	400.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	400.000	-	-	-	400.000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		ANGGARAN	%	FISIK (%)		
KELURAHAN BARANTI	225.243.500	219.238.960	97,33	100,00	6.004.540	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.185.000	123.080.460	16,58	100,00	5.104.540	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.802.000	43.687.000	99,71	100,00	115.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.063.000	1.063.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.736.000	23.736.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.944.000	5.944.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.114.000	4.114.000	100,00	100,00	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.280.000	2.280.000	100,00	100,00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.665.000	6.550.000	98,27	100,00	115.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.053.000	60.084.686	31,81	100,00	4.968.314	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	510.000	510.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000	6.431.686	56,42	100,00	4.968.314	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.143.000	53.143.000	100,00	100,00	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.330.000	19.308.774	-	100,00	21.226	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.632.000	1.610.774	98,70	100,00	21.226	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.054.000	4.054.000	100,00	100,00	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.644.000	13.644.000	100,00	100,00	-	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97.058.500	96.158.500	63,34	100,00	900.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	97.058.500	96.158.500	63,34	100,00	900.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	82.058.500	82.058.500	100,00	100,00	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.000.000	14.100.000	94,00	100,00	900.000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		ANGGARAN	%	FISIK (%)		
KELURAHAN PANRENG	226.718.200	221.555.852	97,72	100,00	5.162.348	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.203.200	107.045.852	20,05	100,00	136.878.386	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.048.000	34.141.000	6,45	100,00	45.652.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.835.000	2.835.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.572.000	18.572.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.151.000	2.151.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	2.092.500	1.841.000	87,98	100,00	251.500	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	735.000	735.000	100,00	100,00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.662.500	8.007.000	92,43	100,00	655.500	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	4.000.000	-	-	-	
Pengadaan Mebel	4.000.000	4.000.000	100,00	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.207.200	59.446.052	44,40	100,00	3.761.148	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	7.038.852	65,17	100,00	3.761.148	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.907.200	50.907.200	100,00	100,00	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.948.000	9.458.800	1,93	100,00	489.200	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.864.000	4.374.800	89,94	100,00	489.200	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.084.000	5.084.000	100,00	100,00	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	114.515.000	114.510.000	82,23	100,00	5.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	114.515.000	114.510.000	82,23	100,00	5.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.515.000	102.510.000	100,00	100,00	5.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	-	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		ANGGARAN	%	FISIK (%)		
KELURAHAN DUAMPANUA	228.841.500	226.529.600	98,99	150,00	2.311.900	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.768.000	128.456.100	98,23	100,00	2.311.900	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.205.000	43.747.500	98,97	100,00	457.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.281.000	1.281.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.882.000	29.882.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.486.000	1.486.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.598.500	1.598.500	100,00	100,00	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.860.000	2.860.000	100,00	100,00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.097.500	6.640.000	93,55	100,00	457.500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.228.000	70.317.600	98,72	100,00	910.400	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	1.045.000	99,52	100,00	5.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.980.000	7.074.600	88,65	100,00	905.400	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.198.000	62.198.000	100,00	100,00	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.335.000	14.391.000	93,84	100,00	944.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.753.000	1.159.000	66,12	100,00	594.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.060.000	2.710.000	88,56	100,00	350.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.522.000	10.522.000	100,00	100,00	-	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.073.500	98.073.500	100,00	100,00	-	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	98.073.500	98.073.500	100,00	100,00	-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	83.073.500	83.073.500	100,00	100,00	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	-	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		ANGGARAN	%	FISIK (%)		
KELURAHAN MANISA	231.641.000	227.858.453	98,37	100,00	3.782.547	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.709.500	126.926.953	97,11	100,00	3.782.547	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.120.500	33.425.500	97,96	100,00	695.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.107.000	1.107.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.870.000	21.870.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.792.000	1.792.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.586.500	1.586.500	100,00	100,00	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.665.000	4.970.000	87,73	100,00	695.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.617.000	12.617.000	100,00	100,00	-	
Pengadaan Mebel	12.617.000	12.617.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.840.000	72.134.453	96,38	100,00	2.705.547	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	1.050.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.650.000	7.952.453	74,67	100,00	2.697.547	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.140.000	63.132.000	99,99	100,00	8.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.132.000	8.750.000	95,82	100,00	382.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.132.000	750.000	66,25	100,00	382.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	-	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.931.500	100.931.500	100,00	100,00	-	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.931.500	100.931.500	100,00	100,00	-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	73.181.500	73.181.500	100,00	100,00	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27.750.000	27.750.000	100,00	100,00	-	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		ANGGARAN	%	FISIK (%)		
KELURAHAN BENTENG	230.017.500	228.851.697	99,49	100,00	1.165.803	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.907.500	156.741.697	99,26	100,00	1.165.803	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.827.500	51.465.000	99,30	100,00	362.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	805.000	805.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.520.000	35.520.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.805.000	3.805.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	800.000	800.000	100,00	100,00	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.800.000	3.795.000	99,87	100,00	5.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.097.500	6.740.000	94,96	100,00	357.500	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.424.000	4.424.000		100	-	
Pengadaan Mebel	4.424.000	4.424.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.464.000	79.368.697	99,88	100,00	95.303	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.273.000	11.230.697	99,62	100,00	42.303	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.691.000	66.638.000	99,92	100,00	53.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.192.000	21.484.000	96,81	100,00	708.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.274.000	2.800.000	85,52	100,00	474.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.734.000	3.500.000	93,73	100,00	234.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.184.000	15.184.000	100,00	100,00	-	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.110.000	72.110.000	100,00	100,00	-	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	72.110.000	72.110.000	100,00	100,00	-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	72.110.000	72.110.000	100,00	100,00	-	



Baranti, 04 Januari 2026

Daftar Baranti

H. MASTURA, S.Pt.
NIP. 197805232003122009